

PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Dani Rachman

*email : dani.rachman1993@gmail.com

Iseu Anggraeni

*email : ise.maheza@gmail.com

Resti Oktaviani

*email : restioktaviani114@gmail.com

Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Bale Bandung

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan seberapa besar pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis regresi linier berganda dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan Pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Bandung yang diperoleh dari data realisasi pendapatan asli daerah 2011-2019.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial penerimaan pajak daerah mempunyai pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah dimana hasil tersebut ditunjukkan dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$. Terdapat pengaruh yang signifikan antara lain-lain pendapatan yang sah terhadap Pendapatan Asli Daerah ini ditunjukkan dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$. Dan hasil uji F menunjukkan $F_{hitung} > F_{tabel}$. Pengaruh yang sangat kuat dapat ditunjukkan pada nilai koefisien determinasi sebesar 0,978 (98%) yang berarti, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung Pada Periode 2011–2019 dipengaruhi oleh Penerimaan Pajak Daerah dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar 98%. Berdasarkan hasil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara penerimaan pajak daerah dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap pendapatan asli daerah pada Pemerintah Daerah kabupaten bandung.

Kata Kunci : Penerimaan Pajak Daerah, Lain-lain Pendapatan Yang Sah dan Pendapatan Asli Daerah.

I. Pendahuluan

Kebijakan pemerintah daerah dan wewenang pemerintah daerah merupakan hak pemerintahan daerah dalam otonominya yang bertujuan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat daerahnya. Adanya otonomi daerah memberikan kewenangan dan kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintahan lebih mandiri. Menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berlaku, memberikan dampak yang sangat luas terhadap perkembangan pemerintahan di daerah. Otonomi yang diberikan kepada daerah merupakan otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah, maka daerah membutuhkan sumber-sumber penerimaan yang cukup memadai.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu pilar kemandirian suatu daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) menurut Undang Undang Republik Indonesia

No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Menurut Undang – Undang No.33 Tahun 2004 Pendapatan asli daerah memiliki 4 sumber yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah, Lain – lain PAD yang sah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang utama dan sangat penting bagi pemerintah daerah.

Pengelolaan sumber-sumber pendapatan, terutama yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah(PAD) idealnya dapat menjadi sumber utama dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Sementara sumber-sumber pendapatan daerah lainnya, seperti Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan yang sah hanya bersifat sebagai pemicu peningkatan Pendapatan Asli Daerah(PAD) dalam menuju kemandirian daerah. Pengelolaan pendapatan daerah senantiasa terkendala oleh persoalan klasik, yang berupa tingginya dominasi transfer dana perimbangan dari pemerintah daerah dibanding Pendapatan Asli Daerah(PAD). Namun demikian, upaya optimalisasi peningkatan pendapatan khususnya Pendapatan Asli Daerah(PAD) dalam memberikan kontribusi yang signifikan terhadap struktur pendapatan daerah selalu dilaksanakan. Rencana pendapatan daerah yang dituangkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya. Secara teknis untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah(PAD) dilakukan dengan cara salah satunya yaitu pendapatan wajib pajak/ pembaruan wajib pajak dilaksanakan untuk memperbaharui data para wajib pajak sehingga dapat diketahui potensi riil dilapangan.

Selama periode 9 tahun pencapaian pendapatan sudah memenuhi target, akan tetapi pencapaian ini masih mengalami fluktuasi selama periode tersebut. Penurunan pendapatan dalam periode 9 tahun yaitu pada tahun 2018. Hal ini terjadi pada Realisasi Lain-lain Pendaptan Asli Daerah Yang Sah dan berpengaruh terhadap pendapatan PAD tahun 2018 yang mengalami penurunan. Penurunan terjadi karena salah satu faktor pendapatan pada Lain-lain pendapatan yang sah menurun, pada penghasilan Badan layanan umum yaitu 84 % dari targetnya yaitu sebesar 346 miliar. Terjadi penurunan dari tahun 2015 setelah 2014 mengalami kenaikan, penurunan terjadi sampai tahun 2019 hal ini disebabkan karena salah satu sumber PAD yaitu retribusi belum memenuhi target pada tahun 2017 yaitu hanya mencapai 86 % dari target retribusi sebesar 24 miliar.

Pemenuhan target pada pajak daerah sudah terealisasi dengan baik walaupun masih mengalami naik turun dalam kenaikannya. Target terendah yaitu pada tahun 2014 dalam pemenuhan targetnya mencapai 112% dari target, karena perolehan pendapatan pajak air tanah mengalami penurunan pada tahun tersebut yaitu sebesar 10 miliar 126% dari targetnya yaitu 8 miliar.

Lain-lain pendapatan yang sah periode 9 mengalami fluktuatif meskipun sudah memenuhi target pada 8 tahun. Namun pada tahun 2018 belum mencapai target yaitu hanya 84% dari target yang dianggarkan. Penurunan ini terjadi karena pada tahun 2018 sumber-sumber lain-lain pendapatan yang sah masih belum memenuhi target diantaranya pada penjualan hasil perternakan pendapatanya 117 miliar hanya 96 % dari targetnya sebesar 122 miliar dan Badan Layanan Umum pendapatanya 235 miliar 74% dari targetnya sebesar 315 miliar.

Berdasarkan data-data diatas menunjukan bahwa Penerimaan Pajak Daerah dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah terhadap PAD sangat berpengaruh karena Pajak daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) hal ini didukung oleh penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Dina Anggraeni pada tahun 2010 dan menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Erni Purnama Sari pada tahun 2011 menunjukan bahwa pajak daerah dan lain-lain pendapatan yang sah berpengaruh signifikan.

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis berasumsi bahwa akan terjadi hal yang sama di pemerintahan Kabupaten Bandung, yang mana penelitian ini sebagaimana yang

**Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Lain-Lain
Pendapatan Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli
Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten
Bandung| Dani Rachman, Iseu Anggraeni, Resti
Oktavianii**

telah disebutkan diatas akan dilaksanakan di Pemerintahan Kabupaten Bandung yaitu pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Dengan demikian, penulis mengambil judul penelitian ini yaitu : **“Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung”**.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Daerah Kabupaten Bandung.
2. Bagaimana pengaruh Lain-lain Pendapatan yang sah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Daerah Kabupaten Bandung.
3. Bagaimana pengaruh penerimaan pajak daerah dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung.

II. Landasan Teoritis

2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pengertian pendapatan asli daerah menurut Ahmad Yani (2009: 12) pendapatan asli daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil daerah lain yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan atas desentralisasi.

Adapun menurut Baldrick (2017: 31) pendapatan asli daerah atau yang selanjutnya disebut PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Sedangkan menurut Carunia (2017: 118) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya.

2.2 Pengertian Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2011: 12) pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Darwin (2010: 59) menyatakan pajak daerah yaitu luran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah tanpa balas jasa langsung yang dapat ditunjuk, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

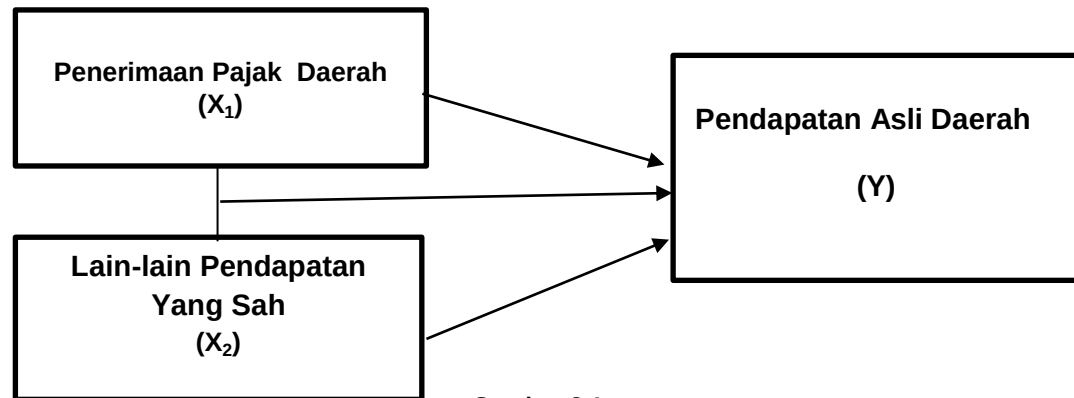
Adapun Raharjo (2014: 72) menyatakan bahwa pajak daerah yaitu kewajiban penduduk masyarakat menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu sanksi atau hukum.

2.3 Pengertian Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Menurut Halim (2014: 112) lain-lain pendapatan yang sah ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Transaksi ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut diatas.

2.4 Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Lain-lain Yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung dapat digambarkan skema paradigma penelitian sebagai berikut :



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.5 Hipotesis

Berdasarkan penjelasan diatas dan berdasarkan kerangka pemikiran yang ada, maka peneliti mencoba merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

1. Penerimaan Pajak Daerah secara parsial berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung.
2. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah secara parsial berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung.
3. Penerimaan Pajak Daerah dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

III. Metodologi Penelitian

3.1 Objek Penelitian

Adapun objek penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penerimaan Pajak Daerah
2. Lain-lain Pendapatan Yang Sah
3. Pendapatan Asli Daerah

3.2 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus dengan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, karena penelitian ini mengungkapkan keadaan masalah yang terjadi pada saat penelitian ini berlangsung dan data yang digunakan menekankan pada data-data numeric (angka).

3.2.1 Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi yaitu Laporan keuangan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung.

Teknik penentuan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah didasarkan pada metode non probability sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Sedangkan peneliti dalam hal ini dengan menggunakan pendekatan purposive sampling. Menurut Sugiyono (2015: 67) purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Alasan pemilihan sampel dengan menggunakan purposive sampling adalah karena tidak semua populasi yaitu laporan keuangan tahunan sejak berdirinya

Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung| Dani Rachman, Iseu Anggraeni, Resti Oktavianii

perusahaan sampai dengan sekarang dijadikan sampel. Oleh karena itu, sampel yang dipilih dalam penelitian ini yaitu laporan realisasi pajak daerah, lain-lain pendapatan yang sah dan realisasi pendapatan asli daerah periode 2011 sampai dengan 2019.

3.2.2 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Analisis linear regresi berganda

Analisis linear regresi berganda menurut Sugiono (2017: 275) digunakan peneliti, bila peneliti ingin mengetahui keadaan naik turunnya variabel yang diteliti. Hal ini senada dengan pendapat Sugiyono mengemukakan bahwa analisis regresi ganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi ganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2.

2. Analisis Koefisien Korelasi

Analisis koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan sebab akibat yang terjadi antara Penerimaan Pajak Daerah dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah dengan Pendapatan Asli Daerah. Adapun untuk mengetahui kuat lemahnya hubungan, dilihat pedoman tabel kriteria koefisien korelasi sebagai berikut :

Tabel 3.1
Koefisien Korelasi Dan Taksirannya

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 - 0,199	Sangat Rendah
0,20 - 0,399	Rendah
0,40 - 0,599	Sedang
0,60 - 0,799	Kuat
0,80 - 1,000	Sangat Kuat

Sumber : Sugiyono "Statistika Untuk Penelitian" (2017:231)

3. Koefisien Determinasi

Setelah koefisien korelasi diketahui, maka selanjutnya adalah menghitung koefisien determinasi dengan rumus sebagai berikut:

$$KD = R^2 \cdot 100\%$$

Sumber : Ghazali (2013)

Keterangan :

KD = Koefisien Determinasi

R^2 = Koefisien Korelasi Dikuadratkan

Kriteria untuk analisis koefisien determinasi adalah:

1. Jika Kd mendekati nol (0), maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat lemah.
2. Jika Kd mendekati satu (1), maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat kuat.

4. Pengujian Hiotesis

Hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hipotesis nol (H_0) adalah pernyataan tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik (data sampel) sedangkan hipotesis alternatif (H_a) adalah pernyataan ada perbedaan antara parameter dan statistik. Maka H_0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan H_a menunjukkan adanya dampak antara variabel bebas dan variabel terikat. Hipotesis yang dirumuskan dapat diuji melalui pengujian hipotesis berikut ini:

a. Uji t (Parsial)

Uji t statistik digunakan untuk melihat signifikansi pengaruh penerimaan pajak daerah dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap pendapatan asli daerah secara individu. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} . Setelah menghitung nilai t_{hitung} selanjutnya membuat kesimpulan mengenai diterima atau tidaknya hipotesis setelah dibandingkan antara t_{hitung} dan t_{tabel} dengan ketentuan uji sebagai berikut:

1. Jika $-t_{tabel} \leq t_{hitung} < t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak (tidak berpengaruh).
2. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $t_{hitung} < -t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima (berpengaruh).
3. Apabila menggunakan P- Value, jika nilai $sig < \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak.

b. Uji F (Simultan)

Uji F dikenal dengan uji serentak atau uji model/uji anova, yaitu uji untuk melihat bagaimana pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Kriteria pengujian dengan membandingkan F_{hitung} dan F_{tabel} yaitu:

1. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima (berpengaruh).
2. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak (tidak berpengaruh).
3. Apabila menggunakan program komputer (software SPSS), jika nilai $sig < \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak.

c. Menentukan Taraf Signifikansi

Hasil analisis dan pengujian hipotesis tingkat signifikannya adalah 0,05% ($\alpha = 0,05$) artinya jika hipotesis nol ditolak atau diterima dengan taraf kepercayaan 95%, maka kemungkinan bahwa hasil penarikan dari kesimpulan mempunyai kebenaran 95% dan hal ini menunjukkan adanya pengaruh atau tidak adanya pengaruh yang meyakinkan (signifikan) antara dua variabel tersebut.

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4.1
Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Coefficientsa

Model				Standardized Coefficients	t	Sig.
				Beta		
1	(Constant)	7977.153	4163.836		1.916	0.104
	Pajak Daerah	1.124	0.210	0.600	5.340	0.002
	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	0.818	0.214	0.429	3.817	0.009

a. Dependent

Variable:

Pendapatan Asli

Daerah

Sumber: Pengolahan data dengan SPSS Versi 26 yang telah diolah kembali

Berdasarkan hasil perhitungan secara manual maupun SPSS diatas, jadi didapat persamaan sebagai berikut :

$$Y = 7977.153 + 1.124 X_1 - 0.818 X_2$$

1. Konstanta sebesar 7977,153

Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel independen ditiadakan atau Penerimaan Pajak Daerah (X_1) dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah (X_2) nilainya 0, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y) adalah 7977,153.

Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung| Dani Rachman, Iseu Anggraeni, Resti Oktavianii

2. Koefisien regresi Penerimaan Pajak Daerah (X_1) sebesar 1,124.
Koefisien regresi (b_1) tersebut hasilnya positif. Hal ini menunjukkan indikasi adanya hubungan yang searah, artinya jika nilai variabel Penerimaan Pajak Daerah (X_1) naik 1% (0,01) maka akan menyebabkan kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 1,124 dengan asumsi variabel lain tetap.
3. Koefisien regresi Lain-lain Pendapatan Yang Sah (X_2) sebesar 0,818.
Koefisien regresi (b_2) tersebut hasilnya positif. Hal ini menunjukkan indikasi adanya hubungan yang searah, artinya jika nilai variabel Lain-lain Pendapatan Yang Sah (X_2) naik 1% (0,01) maka akan menyebabkan kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,818 dengan asumsi variabel lain tetap.

4.2 Analisis Kolerasi

Tabel 4.2
Hasil Analisis Korelasi Pearso
Correlations

	Pajak Daerah	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Pendapata n Asli Daerah
Pajak Daerah	1	.843**	.962**
	Pearson Correlation		
	Sig. (2-tailed)	.004	.000
	N	9	9
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	.843**	1	.935**
	Pearson Correlation		
	Sig. (2-tailed)	.004	.000
	N	9	9
Pendapatan Asli Daerah	.962**	.935**	1
	Pearson Correlation		
	Sig. (2-tailed)	.000	.000
	N	9	9

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Pengolahan data dengan SPSS versi 26

Tabel 4.3
Hasil Analisis Korelasi Ganda
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.989 ^a	0.978	0.971	4208.07704

a. Predictors: (Constant),
Lain-lain Pendapatan Yang
Sah, Pajak Daerah

b. Dependent Variable:
Pendapatan Asli Daerah

Sumber : Pengolahan data dengan SPSS versi 26

Dilihat dari dua tabel perhitungan korelasi diatas, menunjukkan bahwa :

- Korelasi antara Penerimaan Pajak Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 0,962. Berdasarkan tabel kriteria korelasi, termasuk pada nilai korelasi antara 0,80-1,000 mempunyai hubungan yang sangat kuat. Karena hasilnya positif, maka dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan Penerimaan Pajak Daerah akan diikuti oleh kenaikan Pendapatan Asli Daerah.
- Korelasi antara Lain-lain Pendapatan Yang Sah dengan Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 0,935. Berdasarkan tabel kriteria korelasi, termasuk pada nilai korelasi antara 0,80 – 1,000 mempunyai hubungan yang kuat. Karena hasilnya positif, maka dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan Lain-lain Pendapatan Yang Sah akan diikuti oleh kenaikan Pendapatan Asli Daerah.

4.3 Uji t (Parsial)

Untuk mengetahui diterima atau ditolaknya hipotesis penelitian, maka dilakukan pengambilan keputusan sebagai berikut :

- Jika $-t_{\text{tabel}} \leq t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 diterima.
 - Jika $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ atau $t_{\text{hitung}} < -t_{\text{tabel}}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 ditolak.
- Pada tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} untuk variabel bebas Penerimaan Pajak Daerah (X_1) adalah sebesar 5,340 dengan signifikansi 0,01 sedangkan t_{tabel} dengan dk 9 ($n-3 = 9-3$) adalah 2,447 dan taraf signifikansi 0,05. Mengacu pada kriteria pengambilan keputusan dan hasil perhitungan diatas terlihat jika t_{hitung} lebih besar daripada t_{tabel} ($5,340 > 2,447$) dan taraf signifikansi X_1 (0,01) lebih kecil daripada 0,05 maka H_0 ditolak.
 - Pada tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} untuk variabel independen Lain-lain Pendapatan Yang Sah (X_2) adalah sebesar 3,817 dengan signifikansi 0,009 sedangkan t_{tabel} dengan dk 9 ($n-3 = 9-3$) adalah 2,447 dan taraf signifikansi 0,05. Mengacu pada kriteria pengambilan keputusan dan hasil perhitungan diatas terlihat jika t_{hitung} lebih besar daripada t_{tabel} ($3,817 > 2,447$) dan taraf signifikansi X_2 (0,009) lebih kecil daripada 0,05 maka H_0 ditolak.

4.4 Uji F (Simultan)

Tabel 4.4
Hasil Perhitungan Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4742901857.862	2	2371450928.931	133.920	.000 ^b
	Residual	106247474.360	6	17707912.393		
	Total	4849149332.222	8			

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

b. Predictors: (Constant), Lain-lain Pendapatan Yang Sah, Pajak Daerah

Sumber : Pengolahan data dengan SPSS versi 26

Untuk mengetahui diterima atau ditolaknya hipotesis penelitian, maka dilakukan pengambilan keputusan sebagai berikut :

Jika $F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}$ atau probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima.

Jika $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ atau probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak.

Dari tabel diatas, maka dapat dilihat bahwa nilai F_{hitung} adalah 133,920 sedangkan F_{tabel} dapat diperoleh dengan tabel F derajat bebas yaitu residual 4 dan regresi 2 dengan taraf signifikan 0,002 sehingga diperoleh F_{tabel} sebesar 5,14 Karena $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya kedua variabel dependen yang terdiri dari Penerimaan Pajak Daerah (X_1) dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah (X_2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y).

4.5 Pembahasan

4.5.1. Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung periode 2011-2019

Berdasarkan hasil uji t bahwa penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh signifikan karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ $5,340 > 2,447$ dengan nilai $sig < 0,05$ yaitu $0,01$ pada gambar kurva uji dua pihak berada pada daerah penolakan H_0 , maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian keputusan yang diambil dengan tingkat signifikansinya bahwa penerimaan pajak daerah (X_1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) (Y).

Penerimaan pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD), seperti terlihat pada hasil analisis deskriptif bahwa penerimaan pajak daerah selama 9 periode mengalami ketidakstabilan yang cenderung naik disebabkan oleh sumber pajak daerah yang lain yang juga mengalami ketidakstabilan selama 9 periode. Selain itu juga karena pemenuhan realisasi target pajak daerah yang berbeda-beda disetiap tahunnya sehingga mempengaruhi penerimaan pajak daerah.

Pengaruh ini disebabkan oleh sumber penerimaan pajak daerah yaitu BPHTB dan Pajak penerangan jalan yang memiliki kontribusi yang lebih bagi penerimaan pendapatan pajak daerah, peningkatan ini bisa tercapai atas upaya Pemerintah Kabupaten Bandung, salah satunya yaitu pemberian fasilitas BPHTB sesuai dengan UU No 26 Tahun 2009 tentang Perubahan atas APBN tahun 2009, pemerintah memberikan subsidi sebesar 500 Miliar Rupiah pelaksanaan itu dituangkan dalam peraturan menteri keuangan dan upaya Pemerintah Kabupaten Bandung yaitu melakukan kegiatan sosialisasi kepada para notaris dan camat sebagai pejabat pembuat akta tanah menyangkut prosedur pemungutan, pembayaran serta aturan BPHTB. Kemudian dari hasil tersebut dapat diperoleh bahwa penerimaan pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang bisa memberikan kontribusi yang baik pada Pendapatan Asli Daerah. Pengaruh yang signifikan penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah, berarti bahwa bila penerimaan pajak daerah meningkat pendapatan asli daerah juga akan meningkat.

Hasil penelitian ini didukung penelitian terdahulu oleh Zya Rifkah Hasibuan (2020) yang menyatakan bahwa penerimaan pajak daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dan didukung oleh teori yang dikemukakan Ahmad Yani (2009: 12) pendapatan asli daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil daerah lain yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan atas desentralisasi.

4.5.2 Pengaruh Lain-lain Pendapatan Yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung periode 2011-2019

Berdasarkan Hasil uji t bahwa Lain-lain Pendapatan Yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh yang signifikan karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,816 > 2,477$), dengan nilai $sig 0,01 < 0,05$ pada gambar kurva uji dua pihak berada pada daerah penolakan H_0 , maka H_0 ditolak. Dengan demikian keputusan yang diambil dengan tingkat signifikansinya bahwa Lain-lain Pendapatan Yang Sah (X_2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) (Y). Adapun pengaruh secara parsial Lain-lain Pendapatan Yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung sebesar $0,009$ memiliki pengaruh yang sangat kuat.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti terlihat pada hasil analisis deskriptif bahwa ketika sumber pendapatan lain-lain yang sah mengalami fluktuasi yang cenderung meningkat, lain-lain pendapatan yang sah juga mengalami ketidakstabilan yang cenderung meningkat. Faktor yang mempengaruhi peningkatan terdapat pada perolehan pendapatan bunga deposito dan jasa giro. Pendapatan bunga deposito yang lebih tinggi dari pendapatan yang lain, dikarenakan manajemen kas daerah yang baik dan setiap tahunnya diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pengaruh yang signifikan antara lain-lain pendapatan yang sah terhadap pendapatan asli daerah, membuktikan bahwa lain-lain pendapatan yang sah meningkatkan pendapatan asli daerah juga akan meningkat. Kemudian dari hasil tersebut dapat diperoleh bahwa lain-lain pendapatan yang sah merupakan sumber pendapatan yang bisa memberikan kontribusi yang baik pada Pendapatan Asli Daerah.

Hasil penelitian ini didukung penelitian Erni Purnama Sari (2017) yang menyatakan bahwa Lain-lain Pendapatan Yang Sah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Serta didukung oleh teori yang dikemukakan Ahmad Yani (2009: 176) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil daerah lain yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan atas desentralisasi.

4.5.3 Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung periode 2011-2019

Berdasarkan dari hasil uji F menunjukkan bahwa secara simultan penerimaan pajak daerah dan lain-lain pendapatan yang sah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten bandung karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($133,920 > 5,14$ dengan nilai sig, $0,000 < 0,05$ dan pada gambar kurva uji fihak kanan bahwa F_{hitung} berada pada daerah penolakan H_0 , maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian keputusan yang diambil dengan tingkat signifikansinya bahwa Penerimaan Pajak Daerah (X_1) dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah (X_2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y).

Pengaruh yang signifikan Penerimaan Pajak Daerah dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung, bahwa secara bersama-sama dipengaruhi oleh Penerimaan Pajak Daerah dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah, sehingga Penerimaan Pajak Daerah dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Artinya kedua variabel ini apabila bersama-sama akan memberikan kontribusi yang positif, sangat kuat dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung.

Hasil penelitian ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Zya Rifkah Hasyim Hasibuan (2020), yang melakukan penelitiannya pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat, diperoleh hasil bahwa Penerimaan Pajak Daerah (X_1) dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah (X_2) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) baik secara parsial maupun simultan.

V. Simpulan dan Saran

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung, maka peneliti dapat menarik simpulan sebagai berikut :

1. Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki hubungan searah yang sangat kuat dan signifikan, hal ini menunjukkan bahwa secara parsial Penerimaan Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung periode 2011–2019. Artinya setiap kenaikan, penerimaan pajak daerah akan diikuti oleh kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) begitupun sebaliknya, seperti yang terjadi pada pemerintah daerah Kabupaten Bandung Penerimaan Pajak Daerah yang mengalami peningkatan juga diikuti oleh kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Lain-lain Pendapatan Yang Sah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki hubungan searah yang sangat kuat dan signifikan, hal ini menunjukkan bahwa secara parsial Lain-lain Pendapatan Yang Sah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung periode 2011–2019. Artinya setiap kenaikan Lain-lain Pendapatan Yang Sah akan diikuti oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Seperti yang terjadi pada pemerintah daerah Kabupaten Bandung Lain-lain Pendapatan Yang Sah yang mengalami peningkatan juga diikuti oleh kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

**Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Lain-Lain
Pendapatan Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli
Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten
Bandung| Dani Rachman, Iseu Anggraeni, Resti
Oktavianii**

3. Penerimaan Pajak Daerah dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah memiliki hubungan searah, sangat kuat dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung periode 2011-2019. Penerimaan Pajak Daerah dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah secara simultan berpengaruh signifikan dan sangat kuat terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Artinya jika Penerimaan Pajak Daerah dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah sama-sama mengalami kenaikan, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) pun akan meningkat, begitupun sebaliknya, jika Penerimaan Pajak Daerah dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah sama-sama mengalami penurunan, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) pun mengalami penurunan.

5.2 Saran

Adapun saran dari penulis berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Agar pihak instansi dapat mengoptimalkan pendapatan yang stabil dengan mengambil tindakan yang tegas khususnya untuk keterlambatan pembayaran bagi wajib pajak air tanah ataupun wajib pajak yang lainnya agar realisasi selalu memenuhi bahkan lebih besar dari target yang telah dicapai.
2. Khusus untuk pendapatan penjualan hasil perternakan pihak pemerintah harus mengabil kontribusi yang nyata seperti membantu mengadakan upaya peningkatan penjualan salah satunya dengan memperkenalkan pemasaran hasil perternakan daerah secara online berbasis aplikasi yang menjadi wadah penjualan sekaligus memberi jalan untuk para peternak didaerah agar bisa bersaing dipasaran luas dan inovasi dalam pengolahan hasil perternakan guna meningkatkan penjualan dan meningkatkan pendapatan asli daerah.
3. Pihak instansi harus mampu memperhatikan potensi pendapatan yang paling mempengaruhi dan menggali lagi potensi-potensi kekayaan daerah yang bisa dijadikan sumber pendapatan baru seperti pengembangan pada sektor pariwisata dan cagar budaya kabupaten bandung. Kabupaten bandung memiliki keindahan alam yang menakjubkan karena dikelilingi oleh pegunungan dan berhawa sejuk hal ini bisa dijadikan salah satu potensi pengembangan usaha daerah pada sektor pariwisata juga masyarakat suku sundanya yang memiliki banyak kebudayaan dan rumah-rumah adat yang masih terjaga dikabupaten bandung juga bisa dijagikan sebagai cagarbudaya yang dapat menjadikan orang luar negeri maupuun dalam negeri tertarik datang ke kabupaten bandung untuk melihat kebudayaanya sehingga dapat membantu meningkatkan pendapatan asli daerah itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Baldrick. Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua). Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017.
- Darwin. Pajak Daerah Dan Retribusi. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010.
- Firdausy, Carunia Mulya. Kebijakan Dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Jakarta: Ghalia, 2017.
- Halim, Abdul. Akuntansi Sektor Publik. Akuntansi. Jakarta: Grafindo, 2012.
- Halim, MS Kusufi. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Mardiasmo. Akuntansi Sektor Publik. Lima. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2014.
- Mardiasmo. Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi, 2011.
- Marihot P Siahaan. Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo, 2016
- Pendapatan, Dinas, and Pengelolaan Keuangan Dan. Upaya Mengoptimalkan Pajak Daerah Oleh, 2010.
- Soemarso S.R. Akuntansi Suatu Pengantar. Keempat. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sugiyono. Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta 2017.
- Yani, Ahmad. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

- Anggraeni, Dina. "Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Empiris Pada Propinsi Bengkulu)." Skripsi PS. akuntansi/perpajakan, UIN syarif hidayatulla. 2013
- Erni Purnama Sari. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Pemerintah Kabupaten Gresik. 2017.
- Zya Rifkah Hasyim Hasibuan. Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) SeKabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat. 2020.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Indonesia: peraturan.bpk.go.id, n.d.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Dana Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah, n.d.
- <http://jdih.babelprov.go.id/content/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membeani-masyarakat> Diunduh pada 10 Maret 2021 Pukul 20:19 WIB
- <http://repository.unjani.ac.id/repository/af73dac0826fc3b308e26ef3b331e084.pdf> Diunduh pada 10 Maret 2021 Pukul 20:30 WIB
- <http://data.bandung.go.id/apbd/index.php/apbd/pendapatan/4.1.4/2017> Diunduh pada 10 Maret 2021 Pukul 20:44 WIB